



Handwritten signature and date: 25/9-2024

## PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KAWASAN DATARAN TINGGI DIENG KABUPATEN BANJARNEGARA

Vivi Alvianita, Ari Subowo, R. Slamet Santoso  
Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. Soedarto, S.H, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269  
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405  
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### ABSTRAK

Pengembangan pariwisata menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui optimalisasi potensi daerahnya. Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan salah satu prioritas destinasi wisata di Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dan menganalisis peran *stakeholder* tersebut. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di antaranya masyarakat Desa Dieng Kulon, Pokdarwis Dieng Pandawa, Pemerintah Desa Dieng Kulon, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, UPTD Kawasan Wisata Dieng, Kementerian PUPR, Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah, Perhutani, Bank Indonesia, Bank BTN, PT Geodipa Energi, Perguruan Tinggi dan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *stakeholder* primer yang terdiri dari masyarakat lokal dan Pokdarwis Dieng Pandawa berperan sebagai koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator. *Stakeholder* kunci yang terdiri dari pemerintah desa dan pemerintah daerah berperan sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator, sedangkan *stakeholder* sekunder terdiri dari pemerintah, masyarakat, perusahaan, akademisi dan media berperan sebagai fasilitator, implementor, dan akselerator. Namun demikian, peran *stakeholders* tersebut dikatakan belum maksimal karena masih terdapat permasalahan yang muncul dan implementasi program yang belum optimal.

**Kata Kunci :** Pengembangan Pariwisata, Peran, *Stakeholder*

## **ABSTRACT**

*Tourism development is one of the effective strategies to improve the welfare of local communities through optimizing the potential of the region. Dieng Plateau area is one of the priority tourist destinations in Banjarnegara Regency. This research aims to identify stakeholders involved in tourism development in the Dieng Plateau Area of Banjarnegara Regency and analyze the roles of these stakeholders. The methodology used is a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and documentation. Stakeholders involved in tourism development include the Dieng Kulon Village community, Pokdarwis Dieng Pandawa, Dieng Kulon Village Government, Banjarnegara Regency Tourism and Culture Office, UPTD Dieng Tourism Area, Ministry of PUPR, Central Java Cultural Heritage Conservation Center (BPCB), Perhutani, Bank Indonesia, Bank BTN, PT Geodipa Energi, Universities and the media. The results of the study indicate that primary stakeholders consisting of local communities and Pokdarwis Dieng Pandawa act as coordinators, facilitators, implementers, and accelerators. Key stakeholders consisting of village government and local government act as policy creators, coordinators, facilitators, implementers, and accelerators, while secondary stakeholders consisting of government, community, companies, academics and media act as facilitators, implementers, and accelerators. However, the role of these stakeholders is said to be not optimal because there are still problems that arise and the implementation of the program is not optimal.*

**Keywords : Tourism Development, Role, Stakeholders**

## PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan aktivitas atau kegiatan yang saling memberi dampak dan mempengaruhi satu dengan lainnya yang meliputi masyarakat, pemerintah, kelompok organisasi, kelompok bisnis, komunitas, dan wisatawan yang menjadi sebuah sistem dalam kegiatan pembangunan daerah (Saputra & Ali, 2020). Pengembangan pariwisata sebagai bentuk pengembangan masyarakat dan wilayah dengan tujuan untuk melestarikan tradisi lokal masyarakat, membentuk identitas daerah, meningkatkan pendapatan ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan sebagai upaya memanfaatkan potensi pariwisata seoptimal mungkin.

Dataran Tinggi Dieng menjadi salah satu tempat wisata favorit di Jawa Tengah. Pada tahun 2021, Kawasan Dataran Tinggi Dieng meraih penghargaan dan masuk sebagai salah satu dari 6 (enam) desa di Provinsi Jawa Tengah sebagai pemenang Anugrah Desa Wisata Indonesia (ADW) Kategori Desa Wisata Maju yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Kawasan Dataran Tinggi Dieng merupakan kawasan wisata yang mempunyai potensi alam dan budaya yang dimanfaatkan sebagai daya tarik

wisatawan, serta memiliki potensi pertanian, panas bumi, dan hutan lindung.

*Dieng Plateau* berada pada ketinggian 2.565 mdpl dan memiliki banyak potensi alam serta warisan budaya masa lalu. Kawasan Dataran Tinggi Dieng berada pada  $4^{\circ}37'$  -  $5^{\circ}15'$  Lintang Selatan,  $106^{\circ}52'$  Bujur Timur. Kawasan ini dikelola oleh Pemerintah Daerah Kab. Banjarnegara dan Kab. Wonosobo karena letaknya yang berada di 2 (dua) wilayah administratif kabupaten tersebut, yaitu di Dieng Kulon dan Dieng Wetan dengan luas wilayah Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara lebih luas, yaitu 383 Ha dibanding wilayah Dieng Wetan, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo yang hanya 282 Ha.

Alam dan budaya merupakan bagian dari kehidupan yang sangat lekat dengan keseharian mayoritas masyarakat di Indonesia. *Dieng Plateau* adalah tempat wisata yang tidak hanya memiliki dataran tinggi yang dingin dan asri, tetapi juga menawarkan pengalaman budaya dengan peninggalan masa lalu yang masih dilestarikan. Karakteristik pariwisata kawasan ini cukup beragam dan terbilang unik, karena Daerah ini memiliki banyak telaga, lembah, kawah (hidrotermal), mata air, perbukitan, pusat produksi sayuran, serta kaya akan warisan budaya baik

kebendaan maupun tak benda seperti makanan, tradisi, dan pertunjukan seni. Kawasan Dataran Tinggi Dieng masuk dalam perencanaan nasional, yaitu dalam Rencana Induk Kepariwisata Nasional (KSPN) Tahun 2010-2025.

Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing Kawasan Dataran Tinggi Dieng pada tahun 2017-2022 cenderung fluktuatif, tetapi di tahun 2020-2021 mengalami penurunan karena maraknya pandemi Covid 19. Jumlah kunjungan wisatawan meningkat pesat hingga mencapai 1.023.930 juta pengunjung pada tahun 2022. Jumlah kunjungan wisatawan Kawasan Dataran Tinggi Dieng dari tahun 2017-2022 dapat dilihat pada grafik berikut :

**Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Kawasan Dataran Tinggi Dieng Tahun 2017-2022**

Tahun	Jumlah Kunjungan
2017	302.215
2018	449.487
2019	404.337
2020	376.967
2021	341.273
2022	1.023.930

Sumber : Disporapar Jawa Tengah, 2022

Rantetadung (dalam Jauhariyah dkk., 2021) pertumbuhan sektor pariwisata dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015

Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 berfungsi sebagai dasar kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara. Peraturan tersebut memuat visi, rencana, dan arah pembangunan kawasan wisata baik yang sudah berkembang maupun yang potensial untuk dikembangkan. Pengembangan daya tarik wisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara berbasis pada nilai-nilai alam, budaya, dan minat khusus.

Sebagaimana dinyatakan dalam RIPPARDA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 bahwa *stakeholder* yang diharapkan bertanggung jawab atas perencanaan, pembangunan, kebudayaan kepariwisataan adalah pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Indikasi program pembangunan pariwisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara di antaranya, yaitu (1) meningkatkan akses jalan ke destinasi wisata potensial, (2) memperkuat kelompok seni budaya khas Dieng, (3) membangun infrastruktur, (4) menambah rambu pengaman di lokasi wisata rentan bencana, dan (5) membangun jalur interpretasi dan paket wisata kawasan Dieng.

Menurut Farida dkk (2020) pariwisata saat ini menjadi *leading sector*

dalam pembangunan ekonomi yang tercepat pertumbuhannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pariwisata juga menjadi sumber pendapatan dengan dibukanya lapangan pekerjaan, berkembangnya usaha dan infrastruktur, sehingga pemerintah bersama dengan pengelola destinasi wisata harus gencar dan konsisten dalam meningkatkan kualitas pariwisata yang dimiliki. Munasef (dalam Chaerunissa & Yuniningsih, 2020) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata merupakan segenap kegiatan yang terkoordinasi untuk meningkatkan daya tarik wisata, menyediakan fasilitas dan infrastruktur, barang dan jasa, serta sarana prasarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pengunjung atau wisatawan.

Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan kawasan wisata. Permasalahan yang belum mampu teratasi dengan maksimal menunjukkan kurangnya peran dari *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu kurangnya fasilitas pariwisata yang memadai, kondisi infrastruktur yang kurang layak, dan kurangnya konservasi lingkungan.

Ginting dkk (2022) mengatakan bahwa pengembangan pariwisata membutuhkan peran dari tiga *stakeholders* yang sangat penting, yaitu masyarakat, pemerintah, dan swasta. Pengembangan pariwisata tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya peran dari *stakeholders*. Peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dapat dikatakan belum maksimal, karena masih terlihat peran dari aktor kepentingan yang belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan untuk mendukung pengembangan pariwisata seperti ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana yang belum memadai, keamanan, serta keseimbangan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan.

Pengembangan pariwisata dapat terwujud dan berjalan dengan maksimal apabila tiap *stakeholder* memiliki fungsi dan perannya masing masing. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan erat hubungannya dengan keterlibatan *stakeholder* (Duante & Nyanjom, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng membutuhkan peran dari berbagai para pemangku kepentingan atau *stakeholders* karena memiliki potensi pariwisata yang besar, namun implementasinya belum maksimal, maka

dalam tulisan ini akan mengkaji tentang “Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***Stakeholder***

Individu atau kelompok yang terlibat dan memiliki kepentingan, terhadap suatu program pembangunan disebut *stakeholder* (Hetifah, 2003). Sjaifudian (dalam Berliandaldo dkk., 2021) membagi pemangku kepentingan menjadi dua kategori, yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. Reed (dalam Saputro, 2011) *stakeholder* adalah orang, kelompok, atau institusi yang memiliki kepentingan dalam suatu proses atau pariwisata. *Stakeholder* merupakan seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kepentingan dan terlibat secara langsung dalam kegiatan atau program pembangunan. *Stakeholders* dibagi menjadi tiga kelompok menurut Crosby (1992), yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder.

### **Peran *Stakeholder***

Menurut Soekamto (dalam Handayani & Warsono, 2017) seseorang dianggap menjalankan peran apabila telah melakukan hak dan kewajiban sesuai

dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak dapat lepas dari peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Ginting dkk (2022) menyatakan bahwa dalam setiap kegiatan pembangunan, *stakeholder* memiliki sumber daya dan kepentingan masing-masing. *Stakeholder* memiliki peran yang dominan dalam program pembangunan termasuk dalam pengembangan. Menurut Nugroho dkk., (2014) *stakeholders* memiliki peran sebagai *policy creator*, koordinator, fasilitator, dan implementor. Keempat peran ini melekat pada *stakeholders* utama, kunci, dan pendukung.

### **Pariwisata**

Pariwisata merupakan suatu perjalanan dengan tujuan meresh dan menenangkan pikiran. Terdapat beberapa pengertian tentang pariwisata menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

- a. James J. Spillane (dalam Hadiwijoyo, 2012), Pariwisata merupakan perjalanan yang singkat dan dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam bentuk kelompok sebagai usaha mencari keseimbangan sosial budaya.
- b. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pariwisata adalah beragam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

- c. Meyers & Zalukhu (2009), Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan sementara waktu dari tempat tinggal semula ke daerah tujuan dengan alasan hanya untuk berlibur, memenuhi rasa ingin tahu, atau menghabiskan waktu senggang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini yakni kualitatif deskriptif. Lokus pelaksanaan penelitian yaitu di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. Fokus penelitian adalah identifikasi dan peran *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata. Subjek penelitian adalah orang yang menjadi informan dan dapat memberikan data sesuai dengan masalah yang akan diteliti (Suharsimi, 2006). Penelitian menggunakan data kualitatif dari data primer yang berasal dari wawancara langsung dengan informan dan observasi di lokasi penelitian, serta data sekunder dari dokumen yang diperoleh peneliti. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan. Keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Identifikasi *Stakeholder* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara**

*Stakeholders* atau para pemangku kepentingan memiliki tugas dan kewajibannya masing-masing dalam upaya mengembangkan pariwisata. Untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat maka aktor yang berperan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder.

#### **a. *Stakeholder* primer**

*Stakeholder* primer atau utama dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara adalah masyarakat yang tinggal di lokasi destinasi wisata. *Stakeholder* primer adalah masyarakat sebagai pembangun fasilitas destinasi pariwisata, pengelola destinasi wisata, dan sebagai pengguna serta pengambil manfaat dari destinasi wisata.

Masyarakat sudah berkontribusi aktif dalam membangun fasilitas pariwisata.

Bentuk fasilitas yang dibangun di antaranya berupa penginapan (*homestay*), warung makan, toko oleh-oleh, dan transportasi. Fasilitas pariwisata tersebut untuk menunjang kebutuhan wisatawan dalam menikmati objek wisata.

**Gambar 1. Fasilitas Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng**



Sumber : dokumentasi informan, 2024

Masyarakat juga berpartisipasi dalam pengelolaan pariwisata, yaitu berupa partisipasi ide atau pikiran, tenaga, dan keterampilan. Partisipasi ide, yaitu melalui penyelenggaraan event *Dieng Culture Festival* (DCF) yang merupakan inisiatif dari Pokdarwis Dieng Pandawa. Partisipasi tenaga oleh masyarakat berupa aksi “Dieng Bersih Bersama” yaitu kegiatan pengelolaan kebersihan di lingkungan masyarakat dan objek wisata. Masyarakat juga berpartisipasi dalam bentuk keterampilan melalui pembuatan produk kerajinan dan makanan khas. Di samping keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, masih terdapat kendala misalnya dalam

pengelolaan sampah yang kurang tenaga kerja dan anggaran dana operasional.

**Gambar 2. Pembangunan Kabin Penginapan di Kawasan Dataran Tinggi Dieng**



Sumber : dokumentasi penulis, 2024

Peran masyarakat di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dalam penggunaan potensi pariwisata sudah dilakukan. Masyarakat yang sebelumnya mayoritas sebagai petani kini sudah mulai mengembangkan potensi pariwisatanya. Potensi pariwisata tersebut dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga menjadi peluang usaha dan membuka lapangan pekerjaan baru, misalnya adanya *homestay* kabin, jasa *tour guide*, penyediaan transportasi, dan sebagainya. Pemanfaatan pariwisata selain berdampak pada sektor ekonomi, juga berdampak pada kehidupan sosial budaya dan lingkungan masyarakat.

#### **b. Stakeholder kunci**

*Stakeholders* kunci dalam pengembangan pariwisata adalah aktor yang memiliki pengaruh kuat dan penting terkait dengan masalah dan kebutuhan dalam pengembangan pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan dan program pengembangan pariwisata. Program tersebut disusun berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015-2030. Untuk melaksanakan peran tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Banjarnegara memiliki bidang-bidang yang berwenang dalam membuat kebijakan, yaitu bidang destinasi pariwisata, bidang kelembagaan dan SDM pariwisata, serta bidang pemasaran pariwisata.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan perannya sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan kepada masyarakat dalam upaya pengembangan pariwisata. *Stakeholder* yang berperan dalam memberikan bantuan teknis pariwisata adalah UPTD Kawasan Wisata Dieng sebagai pelaksana teknis kebijakan di lapangan yang bertanggung jawab kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara juga memberikan bantuan teknis berupa anggaran untuk

melaksanakan program dan penyuluhan kepada para pelaku usaha pariwisata, misalnya kepada pokdarwis, pedagang, pengelola *homestay* dan sebagainya.

### **Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Pemasaran Digital Pariwisata**



Sumber : LKJIP Disparbud Kab. Banjarnegara, 2023

### **c. Stakeholder sekunder**

*Stakeholders* sekunder dalam pengembangan pariwisata merupakan pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana tetapi mereka memiliki kepedulian besar terhadap pengembangan pariwisata.

### **Gambar 4. Proses Rehabilitasi Candi di Komplek Candi Arjuna oleh BPCB Jawa Tengah**



Sumber : *detik.com*

Pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara melibatkan partisipasi dari *stakeholder* lain yang memiliki kepedulian besar dalam suatu program. *Stakeholder* tersebut di antaranya : 1) Kementerian PUPR memberikan bantuan dana dan pembangunan kawasan wisata, 2) BPCB Jawa Tengah melakukan pemeliharaan dan pelestarian cagar budaya, 3) Pokdarwis Dieng Pandawa memberdayakan masyarakat dan menerapkan Sapta Pesona, 4) Perhutani mengelola dan memberikan perizinan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pariwisata, 5) Bank memberikan bantuan modal dan anggaran dana penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata, 6) PT Geodipa Energi melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* mendukung optimalisasi lingkungan misalnya dengan melakukan pendampingan dan pengadaan mesin pengolah sampah, 7) Akademisi melalui program kerja Kuliah Kerja Nyata, dan 8) Media yang berperan sebagai penyedia informasi dan promosi.

## **2. Peran *Stakeholder* dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara**

### **a. *Policy Creator***

*Stakeholders* yang berperan sebagai *policy creator* dalam pengembangan pariwisata adalah *stakeholder* pembuat

kebijakan dan terlibat dalam perencanaan serta pengembangan pariwisata. Peran *policy creator* dijalankan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara terkait peraturan pariwisata. Bupati selaku kepala daerah mengarahkan kepada organisasi perangkat daerah yang berwenang, yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara untuk mendukung pengembangan objek wisata Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dalam pengembangan pariwisata berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Program pengembangan pariwisata yang dibuat merujuk pada Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2015-2030. Program tersebut dibuat oleh bidang kelembagaan dan SDM pariwisata, bidang destinasi pariwisata, bidang pemasaran, dan bidang kebudayaan. Salah satu program pengembangan pariwisata misalnya terkait aksesibilitas, sarana prasarana, fasilitas umum, dan pemberdayaan masyarakat.

Selain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, *stakeholder* yang berperan sebagai *policy creator* adalah UPTD Kawasan Wisata Dieng yang bertugas sebagai pelaksana

teknis kegiatan misalnya terkait pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan sarana prasarana. Namun, masih terdapat implementasi kebijakan yang belum maksimal hal ini dikarenakan masih ditemukan permasalahan terkait fasilitas, infrastruktur, dan lingkungan.

#### **b. Koordinator**

Pengembangan Kawasan Dataran Tinggi Dieng melibatkan banyak *stakeholders* dengan tugas, fungsi, dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan penyelarasan kegiatan dan koordinasi yang lebih intensif dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan pariwisata.

Peran *stakeholder* sebagai koordinator sudah dijalankan namun belum maksimal. Koordinasi yang dilakukan antar pemangku kepentingan berkaitan dengan pengelolaan objek wisata maupun koordinasi dalam mengatasi permasalahan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara sebagai *stakeholder* kunci dalam pengembangan pariwisata melakukan koordinasi dengan *stakeholder* lain yang terlibat, UPTD Kawasan Wisata Dieng sebagai koordinator teknis kegiatan di lapangan dengan para pelaku pariwisata, Pemerintah Desa dan Pokdarwis Pandawa sebagai *stakeholder* yang berperan sebagai

koordinator di lingkungan masyarakat. Peran Pemerintah Desa sebagai koordinator belum maksimal karena belum ada upaya koordinasi dengan Pokdarwis Pandawa terkait dengan program pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng.

#### **c. Fasilitator**

*Stakeholder* yang berperan sebagai fasilitator terdiri dari *stakeholder* utama, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* pendukung. Masyarakat sebagai *stakeholder* utama merupakan aktor yang membangun fasilitas umum pariwisata untuk mendukung kebutuhan wisatawan seperti penginapan, warung makan, toko oleh-oleh, dan sebagainya. UPTD Kawasan Wisata Dieng, Pemerintah Desa Dieng Kulon, Bank Indonesia, Perhutani, PT Geodipa Energi, dan masyarakat juga berperan dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) “Dewanata” mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya.

Pokdarwis Dieng Pandawa juga berperan sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat mulai dari pemuda pemudi, pelaku seni, perempuan dan ibu-ibu, pengelola *home industry*, *homestay* dan sebagainya. Selain itu, Dinas Pariwisata juga berperan dalam penyediaan fasilitas untuk kegiatan pemasaran dan promosi pariwisata melalui *website*.

#### d. Implementor

*Stakeholders* sebagai implementor adalah *stakeholder* yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mewujudkan langkah kebijakan yang telah diambil mencakup kelompok sasaran yang terdiri dari *stakeholder* utama, *stakeholder* kunci, dan *stakeholder* sekunder.

Implementasi kebijakan pengembangan pariwisata dikatakan belum maksimal. Peran implementor tersebut dijalankan oleh *stakeholder* utama, yaitu masyarakat, *stakeholder* kunci Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, UPTD Kawasan Wisata Dieng, dan Pemerintah Desa Dieng Kulon, sedangkan *stakeholder* sekunder adalah aktor aktor lain yang memiliki kepedulian besar dalam program pengembangan pariwisata. Peran *stakeholder* sebagai implementor, yaitu menjalankan program atau tindakan sesuai dengan kebijakan untuk mencapai tujuan. *Stakeholder* sudah menjalankan peran sesuai dengan program atau kegiatan pengembangan pariwisata. Namun, masih terdapat peran yang belum maksimal dibuktikan dengan adanya permasalahan infrastruktur yang kurang memadai dan minimnya upaya pemberdayaan masyarakat.

#### e. Akselerator

*Stakeholders* yang berperan sebagai akselerator dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng salah satunya adalah pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara. Salah satu bidang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara yang berperan dalam mempercepat perkembangan pariwisata adalah bidang pemasaran pariwisata. Bidang pemasaran berperan dalam melakukan promosi dan pemasaran pariwisata baik secara *offline* maupun *online* dengan menggandeng berbagai pihak termasuk media.

#### Gambar 5. Pemasaran Pariwisata Pada Event Gebyar Wisata Nusantara



Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara, 2023

Berkembangnya promosi untuk memudahkan wisatawan mengakses informasi pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara memberikan dampak positif karena mampu mendatangkan orang untuk

menikmati dan tertarik berkunjung ke Dieng. Namun, masih terdapat kendala kurangnya sumber daya manusia pengelola di bidang pemasaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan maka diambil kesimpulan bahwa *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara diidentifikasi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu *stakeholder* primer, *stakeholder* sekunder, *stakeholder* kunci.

*Stakeholder* primer yaitu masyarakat Desa Dieng Kulon dan Pokdarwis Dieng Pandawa. Keterlibatan *stakeholder* tersebut ditunjukkan dengan peran masyarakat dalam membangun fasilitas pariwisata berupa pembangunan *homestay*, warung makan, toko oleh-oleh, dan sebagainya. Namun, kondisi lahan dan pemukiman menyebabkan belum maksimalnya pembangunan fasilitas pariwisata. Masyarakat juga aktif dalam mengelola pariwisata melalui kontribusi ide, tenaga, dan keterampilan seperti sebagai inisiator penyelenggaraan *Dieng Culture Festival*, sebagai pengelola sampah pariwisata, dan memiliki keterampilan dalam membuat produk makanan serta kerajinan khas Dieng. Potensi pariwisata alam maupun budaya yang dimiliki dimanfaatkan masyarakat

sekitar sebagai peluang terbukanya lapangan pekerjaan. Pariwisata berdampak positif terhadap kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat, namun memiliki dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan karena pembangunan yang terus dilakukan.

*Stakeholder* kunci dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, UPTD Kawasan Wisata Dieng, dan Pemerintah Desa Dieng Kulon. *Stakeholder* tersebut memiliki peran dalam pembuatan kebijakan dan program, pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan sebagai pemberi bantuan teknis pengembangan pariwisata.

*Stakeholder* sekunder dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara, yaitu Kementerian PUPR, Podarwis Dieng Pandawa, Balai Pelestari Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah, Perhutani, Bank Indonesia, Bank BTN, PT Geodipa Energi, Perguruan Tinggi, dan media.

Peran *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dianalisis berdasarkan lima peran, yaitu : *policy creator*, koordinator, fasilitator, implementor, dan akselerator.

*Stakeholders* yang melaksanakan peran sebagai *policy creator* yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara dan UPTD Kawasan Wisata Dieng. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara berperan dalam membuat kebijakan, program dan mengambil keputusan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Banjarnegara tahun 2015-2030. Program dibuat oleh masing-masing bidang. UPTD Kawasan Wisata Dieng berperan sebagai pelaksana teknis kegiatan di lapangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Peran koordinator dalam pengembangan pariwisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, UPTD Kawasan Wisata Dieng, dan Pokdarwis Dieng Pandawa. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* lain yang terlibat dalam pengembangan pariwisata, sedangkan UPTD Kawasan Wisata Dieng melakukan koordinasi dengan para pelaku pariwisata, mengelola dan mengawasi program pengembangan pariwisata secara langsung di lapangan dengan masyarakat. Pokdarwis Dieng Pandawa melakukan koordinasi dengan masyarakat dan *stakeholder* lain yang terlibat dalam pengembangan

pariwisata.

Peran fasilitator dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan oleh seluruh *stakeholder* yang terlibat. *Stakeholder* sebagai implementor dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara belum melaksanakan perannya dengan maksimal. Hal ini dilihat dari implementasi kebijakan oleh *policy creator* yang belum diterapkan dengan optimal.

Akselerator meliputi peran dalam mempercepat dan memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara. Kontribusi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara, yaitu melakukan pemasaran pariwisata melalui *online* maupun *offline* misalnya dengan pembuatan *website*, sosial media, pameran pariwisata, kegiatan famtrip, dan sebagainya. Namun, promosi melalui *online* belum maksimal karena web yang sering *down* dan kurangnya SDM pengelola media sosial.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, berikut saran yang dapat peneliti berikan guna memberikan masukan dalam pengembangan pariwisata di Kawasan Dataran Tinggi Dieng Kabupaten Banjarnegara.

1. Perlunya menjalin kerjasama dengan *stakeholder* lain dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan.
2. Perlunya program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kompetensi masyarakat dalam pemasaran usaha pariwisata mereka misalnya promosi produk, jasa, akomodasi, dan sebagainya.
3. Perlu melakukan penataan kawasan pemukiman masyarakat, tidak hanya di objek wisata saja.
4. Pemerintah perlu lebih tegas dalam memberikan himbauan membuang sampah pada tempatnya dan melakukan monitoring pengelolaan sampah.
5. Perlu adanya program pembangunan Sumber Daya Manusia pariwisata untuk meningkatkan kompetensi baik masyarakat, pelaku usaha pariwisata, maupun tenaga kerja di bidang terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021b). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234.
- Chaerunissa, S. F., & Yuniningsih, T. (2020). Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 159–175.
- Crosby, B. (1992). *Stakeholder analysis: a vital tool for strategic managers*. USAID's Implementing Policy Change Project.
- Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jawa Tengah. (2022). *Statistik Pariwisata Jawa Tengah Tahun 2022*.
- Duarte Alonso, A., & Nyanjom, J. (2017). Local stakeholders, role and tourism development. *Current Issues in Tourism*, 20(5), 480–496.
- Farida, F., Zulaikha, Z., & Putro, H. E. (2020). Desentralisasi wisata religi Indonesia melalui city branding wisata kabupaten Bangkalan Madura. *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 6(02), 223–234.
- Ginting, G., Kismartini, K., Yuniningsih, T., & Afrizal, T. (2022). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata Siosar. *PERSPEKTIF*, 11(1), 8–15.
- Hadiwijoyo, S. S. (2012). *Perencanaan pariwisata perdesaan berbasis masyarakat: Sebuah pendekatan konsep*. Graha Ilmu.
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017a). Analisis peran stakeholders dalam pengembangan objek wisata Pantai

- Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(3), 40–53.
- Jauhariyah, N. A., Habibulloh, H., & Yazid, A. A. (2021). Potret Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan Dalam Perspektif Islam Di Kabupaten BANYUWANGI. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(1), 86–99.
- Meyers, K., & Zalukhu, S. (2009). Panduan Dasar Pelaksanaan Ekowisata. *Jakarta: Unesco Office*
- Nugroho, H. C., Zauhar, S., & Suryadi, S. (2014). Koordinasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan di kabupaten Nganjuk. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 5(1).
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara
- Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomo 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030
- Putra, Pradana. (2024). Melihat Proses Rehabilitasi Candi Srikandi di Dieng. *Detik.com*. Diakses dari <https://www.detik.com/edu/foto/d-7429108/melihat-proses-rehabilitasi-candi-srikandi-di-dieng-pada-10-juni-2024>
- Saputra, A., & Ali, K. (2020). Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 564–584.
- Saputro, P. B. (2011). *Tata Kelola Wisata di Dataran Tinggi Dieng Provinsi Jawa Tengah*. INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- Suharsimi, A. (2006). *metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara. Bina Aksara.